

**PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI FONDASI SOSIAL: ANALISIS KOMPARATIF
SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DAN KUBA DALAM MEWUJUDKAN
PEMERATAAN DAN KUALITAS**

Enong Holilah¹, Ryco Hermawan², Sholeh Hidayat³

Pendidikan Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹

Pendidikan Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²

Pendidikan Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa³

Alamat e-mail : 1enongholilah@gmail.com, Alamat e-mail :

2rycohermawan27@email.com, Alamat e-mail : 3sholeh.hidayat@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of basic education as a social pillar in Indonesia and Cuba, two countries that differ significantly in political structures, economic capacity, and public policy orientation. The study aims to describe the efforts of both countries to achieve equitable access to education, improve literacy skills, and fulfill the state's responsibility in providing quality basic education. In addition, this research identifies strategic lessons that Indonesia can learn from Cuba's success in strengthening foundational learning. The main argument emphasizes that differences in educational outcomes, particularly in literacy and completion rates, reflect fundamental differences in governance structures, levels of educational investment, and the philosophical foundations of each country's education system. This study employs a qualitative comparative analysis approach using recent secondary data, including policy documents, scholarly publications, national assessment results, international education indicators from the World Bank for the period 2020–2022, OECD PISA 2022 data, and case studies related to curriculum and literacy programs. The analysis focuses on education governance structures, directions of curriculum reform, literacy improvement strategies, and the distribution and utilization of educational resources. The findings indicate that Cuba has achieved near-universal literacy through centralized governance and sustained national literacy programs, while Indonesia has made progress but continues to face quality disparities due to decentralization challenges and unequal resource distribution.

Keywords: Basic education, literacy, education governance, comparative study, educational equity, Indonesia, Cuba.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran pendidikan dasar sebagai pilar sosial di Indonesia dan Kuba, dua negara yang memiliki perbedaan signifikan dalam struktur politik, kapasitas ekonomi, dan orientasi kebijakan publik. Kajian ini bertujuan menggambarkan upaya kedua negara dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kemampuan literasi, serta melaksanakan tanggung jawab negara dalam penyediaan pendidikan dasar yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi pelajaran strategis yang dapat dipetik Indonesia dari keberhasilan Kuba dalam memperkuat pembelajaran fondasional. Argumen utama

penelitian menegaskan bahwa perbedaan capaian pendidikan, khususnya pada aspek literasi dan kelulusan, mencerminkan perbedaan mendasar dalam tata kelola, tingkat investasi pendidikan, dan landasan filosofis sistem pendidikan masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komparatif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder mutakhir, meliputi dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, hasil asesmen nasional, indikator pendidikan internasional World Bank periode 2020-2022, OECD PISA 2022, serta studi kasus terkait kurikulum dan program literasi. Analisis difokuskan pada struktur tata kelola pendidikan, arah reformasi kurikulum, strategi peningkatan literasi, serta distribusi dan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kuba mencapai tingkat literasi mendekati universal melalui tata kelola terpusat dan program literasi berkelanjutan, sementara Indonesia menunjukkan kemajuan namun masih menghadapi ketimpangan kualitas akibat tantangan desentralisasi dan distribusi sumber daya yang belum merata.

KATA KUNCI : Pendidikan dasar, literasi, tata kelola pendidikan, studi komparatif, pemerataan pendidikan, Indonesia, Kuba

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar dipahami sebagai fondasi sosial yang menentukan arah perkembangan individu sekaligus kapasitas negara dalam menopang pembangunan jangka panjang. Dalam konteks global, investasi pada pendidikan dasar tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan literasi, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat partisipasi kewargaan, produktivitas ekonomi, dan integrasi sosial. Oleh karena itu, kajian komparatif antarnegara dengan capaian pendidikan yang berbeda menjadi penting untuk memahami bagaimana variasi kebijakan, tata kelola, dan orientasi filosofis

pendidikan menghasilkan perbedaan kualitas pembelajaran.

Indonesia dan Kuba merepresentasikan dua konteks yang kontras. Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem pendidikan yang terdesentralisasi serta ditandai oleh keragaman sosial dan budaya. Sementara itu, Kuba dikenal memiliki tingkat literasi mendekati universal, sistem pendidikan yang sangat terpusat, serta komitmen kuat terhadap prinsip pemerataan sosial. Perbedaan karakter ini menjadikan kedua negara relevan untuk dikaji secara komparatif.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan dasar Kuba bertumpu pada konsistensi kebijakan pemerintah dan alokasi

anggaran pendidikan yang melebihi 12% PDB sebagaimana dilaporkan oleh World Bank periode 2020-2022, serta implementasi program literasi nasional seperti *Yo, Sí Puedo* (Lamrani, 2022). Selain itu, pembelajaran di sekolah dasar Kuba menekankan integrasi literasi baru dan kolaborasi komunitas secara intensif (Williams, 2022), dengan filosofi kesetaraan sosial sebagai landasan utama sistem pendidikan yang dijalankan melalui kontrol negara yang kuat (Uçar, 2022).

Sebaliknya, Indonesia tengah melakukan reformasi pendidikan melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan antardaerah dan variasi capaian pembelajaran. Kondisi ini tercermin dalam laporan PISA 2022 (OECD, 2023), berbagai kajian reformasi kurikulum (2023), serta evaluasi kebijakan pendidikan terkini (Hariyono, 2024). Program literasi di tingkat sekolah dasar, seperti pojok baca, juga menunjukkan hasil yang belum konsisten (Apriyani, 2024), mengindikasikan perlunya penguatan intervensi di tingkat satuan pendidikan.

Dalam diskursus mengenai sentralisasi dan desentralisasi pendidikan dasar, perbandingan Indonesia dan Kuba memberikan konteks analitis yang relevan. Kuba sering diposisikan sebagai negara dengan capaian tinggi meski sumber daya terbatas, sedangkan Indonesia mencerminkan investasi menengah dengan hasil belajar yang belum merata. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kedua negara membangun pendidikan dasar sebagai pilar sosial melalui kajian tata kelola, strategi pemerataan, inovasi literasi, dan prioritas kebijakan. Tulisan ini berargumen bahwa kualitas pendidikan dasar tidak semata ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi oleh kohesi kebijakan, konsistensi implementasi, dan komitmen terhadap prinsip pemerataan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis sistem pendidikan dasar di Indonesia dan Kuba. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam terhadap perbedaan dan persamaan tata kelola

pendidikan, kebijakan pemerataan, program literasi, serta capaian hasil belajar melalui penafsiran kritis terhadap berbagai sumber dokumenter. Pendekatan ini sejalan dengan model penelitian pendidikan komparatif lintas negara yang dikemukakan oleh Munawir (2021), yang menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dalam membandingkan sistem pendidikan antarnegara.

Populasi penelitian mencakup literatur akademik, laporan internasional, dokumen kebijakan, dan dataset pendidikan yang relevan dengan konteks Indonesia dan Kuba yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Dari populasi tersebut, dipilih 15 sumber utama sebagai sampel analisis. Sampel meliputi artikel jurnal peer-reviewed, laporan OECD PISA 2022, data World Bank periode 2020–2022, laporan UNESCO tahun 2021–2022, serta studi kebijakan dan program literasi nasional dari kedua negara. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas institusi penerbit, serta kebaruan informasi, sehingga data yang dianalisis memiliki kualitas dan validitas yang memadai.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dengan menelaah secara sistematis jurnal internasional bereputasi, laporan kebijakan dari lembaga nasional dan global, basis data statistik pendidikan, serta dokumen resmi pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan dasar. Penggunaan beragam jenis dokumen ini memungkinkan penelitian mencakup dimensi normatif, empiris, dan komparatif secara seimbang. Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen yang disusun berdasarkan kerangka kerja pendidikan komparatif. Lembar analisis tersebut memuat lima kategori utama, yaitu: (1) tata kelola pendidikan dasar, (2) pembiayaan dan pemerataan sumber daya, (3) kurikulum dan strategi literasi, (4) indikator capaian hasil belajar, serta (5) filosofi sosial yang melandasi sistem pendidikan masing-masing negara. Kategori ini berfungsi sebagai pedoman analisis untuk menjaga konsistensi pengkodean data dan meminimalkan bias interpretasi.

Validitas instrumen dijaga melalui expert judgment informal dengan mencocokkan kategori analisis terhadap teori dan kerangka konseptual pendidikan komparatif

yang telah mapan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa indikator yang digunakan relevan secara keilmuan dan mampu merepresentasikan perbedaan struktural antara Indonesia dan Kuba. Dengan demikian, instrumen penelitian memiliki validitas isi serta keselarasan antara teori, konsep, dan data empiris.

Analisis data dilakukan menggunakan thematic comparative analysis. Proses analisis berlangsung secara iteratif melalui empat tahap. Tahap pertama adalah seleksi dan pengelompokan data berdasarkan tema utama. Seluruh dokumen dibaca secara cermat, kemudian dikodekan dan dikelompokkan sesuai kategori tematik, seperti tata kelola, pembiayaan, kurikulum, literasi, dan capaian belajar. Tahap kedua adalah penyusunan matriks perbandingan untuk menyoroti persamaan dan perbedaan kedua negara secara sistematis. Matriks ini berfungsi sebagai alat analitis untuk mengidentifikasi pola kebijakan dan konteks implementasinya. Tahap ketiga adalah penafsiran kritis temuan dengan merujuk pada literatur pendukung dari UNESCO, OECD, dan studi akademik relevan guna

memperkuat argumentasi secara triangulatif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merangkum temuan utama serta mengidentifikasi pelajaran kebijakan yang berpotensi diadaptasi oleh Indonesia.

Dalam penelitian berbasis literatur ini, peran peneliti bersifat interpretatif, yaitu menilai relevansi data, menafsirkan konteks sosial-politik, dan menyintesiskan temuan dari berbagai sumber. Validitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari World Bank, OECD, UNESCO, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan resmi. Penelitian dilaksanakan secara daring selama Januari-Maret 2025 dengan memanfaatkan akses digital ke perpustakaan elektronik dan basis data global.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Struktur Tata Kelola dan Kebijakan Pendidikan

Hasil analisis dokumen kebijakan dan laporan internasional menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Indonesia dan Kuba dalam struktur tata kelola serta arah

kebijakan pendidikan dasar. Kuba menerapkan sistem pendidikan yang sepenuhnya tersentralisasi, di mana pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam perumusan kurikulum, penetapan prinsip pedagogis, serta distribusi tenaga pendidik ke seluruh wilayah negara. Program literasi nasional, termasuk kampanye “*Yo, Sí Puedo*”, ditetapkan sebagai kebijakan negara yang terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan baca tulis seluruh warga negara (Uçar, 2022). Pendekatan ini dirancang untuk menjamin keseragaman standar pendidikan dan memastikan pemerataan layanan pendidikan tanpa memandang lokasi geografis.

Efektivitas sistem tersentralisasi di Kuba tercermin dari kemampuan negara dalam menjaga kualitas pendidikan secara nasional. Kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi diterapkan secara seragam sehingga setiap sekolah beroperasi dalam kerangka kompetensi yang sama. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab penuh atas penyediaan sumber daya pendidikan, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat diminimalkan. Kondisi ini memungkinkan terciptanya

stabilitas kualitas pendidikan, termasuk di wilayah terpencil.

Sebaliknya, Indonesia menerapkan model desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Desentralisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan relevansi kebijakan dengan konteks lokal (OECD, 2023; Hariyono, 2024). Pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan sumber daya, perencanaan anggaran, dan program pemberdayaan sekolah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan serius. Perbedaan kapasitas fiskal, kualitas manajemen pendidikan daerah, serta kondisi sosial-ekonomi memicu ketimpangan kualitas layanan pendidikan. Daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas, guru, dan program pembelajaran yang lebih baik dibandingkan daerah terpencil. Dengan demikian, meskipun memberikan fleksibilitas, struktur desentralistik di Indonesia berkontribusi terhadap

ketidakmerataan kualitas pendidikan antarwilayah. Secara konseptual, perbedaan ini mencerminkan perbedaan filosofi tata kelola, di mana Kuba menekankan keseragaman dan pemerataan nasional, sedangkan Indonesia mengakomodasi keragaman lokal dengan konsekuensi disparitas implementasi.

2. Akses dan Alokasi Sumber Daya

Perbedaan tata kelola tersebut berkaitan erat dengan pola alokasi sumber daya pendidikan. Kuba mengalokasikan lebih dari 12% PDB untuk sektor pendidikan, mencerminkan komitmen ideologis yang kuat terhadap pembangunan manusia dan pemerataan akses pendidikan (Lamrani, 2022). Anggaran ini digunakan tidak hanya untuk gaji guru, tetapi juga pengembangan infrastruktur, penyediaan bahan ajar gratis, serta pelaksanaan program literasi nasional berskala luas seperti “*Yo, Sí Puedo*”.

Indonesia, di sisi lain, mengalokasikan sekitar 3,6 - 4% PDB untuk pendidikan dasar. Meskipun nilai anggaran meningkat secara nominal, proporsinya relatif lebih rendah. Pemerintah Indonesia telah

meluncurkan berbagai program nasional, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan layanan makan gratis bagi siswa sekolah dasar (Financial Times, 2025). Program-program ini berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan, namun belum sepenuhnya mengatasi persoalan kualitas dan kesenjangan antarwilayah.

2.1 Infrastruktur dan Distribusi Guru

Perbedaan alokasi sumber daya tercermin jelas dalam infrastruktur dan distribusi guru. Kuba menerapkan sistem rekrutmen, pelatihan, dan penempatan guru yang sepenuhnya dikendalikan negara, sehingga distribusi tenaga pendidik relatif merata. Sekolah di wilayah pedesaan memiliki fasilitas yang sebanding dengan sekolah perkotaan, memungkinkan proses pembelajaran berlangsung stabil dan berkualitas. Pemerataan ini menjadi faktor utama keberhasilan Kuba mencapai tingkat literasi hampir universal.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan guru dan infrastruktur. Guru

berkualifikasi tinggi cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa, sementara daerah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur mengalami kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, keterbatasan fasilitas dasar di sekolah-sekolah terpencil berdampak pada kualitas proses pembelajaran dan waktu belajar siswa, sehingga memperlebar kesenjangan capaian akademik.

2.2 Program Literasi

Dalam aspek literasi, Kuba mengembangkan program yang komprehensif dan terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat. Program literasi melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas, sehingga literasi menjadi bagian dari budaya sosial warga negara (Williams, 2022). Sebaliknya, Indonesia telah mengembangkan program literasi seperti sudut baca, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada ketersediaan sumber daya dan dukungan lingkungan sekolah. Sekolah dengan keterbatasan anggaran sering kesulitan menyediakan koleksi bacaan yang memadai, sehingga dampak program literasi belum merata (Apriyani, 2024).

3. Hasil Belajar dan Dampak Sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuba berhasil mencapai capaian literasi dan hasil belajar yang tinggi melalui konsistensi kebijakan, alokasi sumber daya besar, serta tata kelola terpusat. Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan kualitas pendidikan dasar, yang menuntut penguatan kebijakan nasional agar lebih mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Indonesia, di sisi lain, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan capaian akademik siswa. Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah tercermin dalam hasil survei internasional seperti PISA 2022, di mana skor Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD (OECD, 2023). Perbedaan input pendidikan, kualitas guru, dan kondisi sosial-ekonomi siswa berkontribusi besar terhadap ketimpangan capaian ini. Meskipun tingkat retensi sekolah dasar terbilang cukup baik, yaitu 92%, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Kuba yang mencapai 99%. Demikian pula tingkat literasi dasar di Indonesia

sebesar 85% masih tertinggal jauh dari Kuba yang sudah mencapai 99%.

Ketimpangan antarwilayah di Indonesia juga memengaruhi mobilitas sosial jangka panjang. Siswa dari daerah dengan fasilitas pendidikan minim memiliki peluang yang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan berkompetisi di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Hal ini menciptakan lingkaran ketidaksetaraan yang sulit diputus jika tidak diiringi intervensi kebijakan yang tepat.

Tabel 1. Perbandingan Indikator Pendidikan Dasar Indonesia dan Kuba

Indikator	Indonesia	Kuba
Literasi dasar (%)	85	99
Retensi SD (%)	92	99
Pengeluaran pendidikan (%PDB)	3,6–4	>12
Guru per 1.000 siswa	2,8	3,5

D. DISKUSI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola pendidikan

dan tingkat komitmen negara terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan faktor kunci yang membedakan capaian pendidikan Indonesia dan Kuba. Dalam konteks Kuba, pendidikan dasar diposisikan tidak sekadar sebagai layanan publik, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mencapai pemerataan sosial dan pembangunan manusia jangka panjang. Negara mengambil peran dominan melalui sistem pengendalian terpusat yang mencakup penyusunan kurikulum nasional, rekrutmen dan distribusi guru, pelatihan tenaga pendidik, serta perencanaan dan pelaksanaan program literasi yang menyeluruh. Pendekatan sentralistik ini memungkinkan terciptanya sistem pendidikan yang seragam, terkontrol, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, meskipun menuntut kapasitas manajerial negara yang tinggi.

Pola tata kelola tersebut berdampak langsung pada pemerataan kualitas tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas sekolah, dan efektivitas kebijakan literasi yang berorientasi pada masyarakat. Pendidikan di Kuba tidak hanya

berfungsi untuk meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga membentuk identitas sosial warga negara yang menjunjung nilai kesetaraan dan partisipasi. Integrasi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan sosial yang kuat terbukti menjadi fondasi penting dalam pencapaian tingkat literasi hampir universal serta tingginya retensi pendidikan dasar.

Sebaliknya, Indonesia berada dalam situasi yang lebih kompleks. Meskipun telah melakukan berbagai reformasi kebijakan, termasuk penerapan Kurikulum Merdeka dan penguatan program literasi sekolah, sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural akibat penerapan desentralisasi. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Namun, perbedaan kapasitas kelembagaan, kemampuan fiskal, dan kualitas tata kelola antardaerah menimbulkan variasi signifikan dalam mutu layanan pendidikan.

Kondisi geografis Indonesia yang luas dan berciri kepulauan

semakin memperumit upaya pemerataan pendidikan. Distribusi tenaga pendidik dan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi persoalan strategis yang belum sepenuhnya teratasi. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas belajar dan bahan ajar, sementara guru berkualifikasi tinggi cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Ketimpangan ini berimplikasi pada kualitas proses pembelajaran dan memperlebar kesenjangan capaian belajar secara nasional.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Lamrani (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan pendidikan di Kuba tidak hanya bertumpu pada sistem pendidikan formal, tetapi juga pada integrasi literasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Williams (2022) menegaskan bahwa budaya literasi di Kuba terbentuk karena kebijakan pendidikan dipadukan dengan peran aktif keluarga, komunitas, dan organisasi sosial. Dalam konteks Indonesia, temuan ini mengindikasikan bahwa literasi seharusnya dipahami sebagai proses

transformasi sosial, bukan sekadar program teknis di sekolah.

Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan OECD (2023) yang menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan berpotensi menciptakan ketimpangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan standar kualitas yang kuat. Dalam praktiknya, pengawasan pendidikan di Indonesia masih bersifat terfragmentasi, sehingga setiap daerah menerapkan standar pengelolaan yang berbeda. Ketidaksamaan ini pada akhirnya tercermin dalam variasi hasil belajar siswa, baik pada asesmen nasional maupun internasional.

Secara sosial, pendidikan dasar di Kuba terbukti berperan sebagai fondasi kesetaraan dan mobilitas sosial jangka panjang. Melalui pendidikan yang merata dan sistematis, negara menciptakan peluang yang luas bagi warga untuk mengembangkan kompetensi dasar dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Literasi berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi proses emansipasi sosial dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indonesia memiliki potensi untuk mencapai fungsi sosial pendidikan yang serupa melalui kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal dan penguatan pembelajaran kontekstual. Namun, efektivitas pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial masih bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, diperlukan koherensi kebijakan antartingkat pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih program. Kedua, peningkatan kapasitas pemerintah daerah harus menjadi prioritas agar desentralisasi pendidikan dapat berjalan efektif. Ketiga, penguatan budaya literasi masyarakat perlu didorong agar proses belajar tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada dukungan keluarga dan komunitas.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini cukup signifikan. Penguatan program literasi berbasis komunitas menjadi kebutuhan strategis di Indonesia, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses sumber belajar. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap dampak

desentralisasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan akses guru berkualitas, infrastruktur, dan efektivitas anggaran. Integrasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan sosial juga menjadi kunci agar pendidikan dasar mampu berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keberlanjutan.

E. Kesimpulan

Penelitian komparatif ini menegaskan bahwa pendidikan dasar tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga berperan strategis sebagai fondasi sosial yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia, kohesi sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Perbandingan antara Kuba dan Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan capaian pendidikan sangat dipengaruhi oleh struktur kebijakan, tata kelola pendidikan, dan tingkat komitmen negara dalam menjadikan pendidikan dasar sebagai prioritas pembangunan.

Dalam konteks Kuba, pendidikan dasar diposisikan sebagai pilar utama pembangunan nasional melalui model sentralisasi yang kuat, alokasi anggaran pendidikan lebih dari 12% PDB, serta pelaksanaan program

literasi nasional yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat. Sentralisasi memungkinkan negara mengendalikan kurikulum, distribusi dan pelatihan guru, serta standar evaluasi secara konsisten. Program literasi seperti *Yo, Sí Puedo* tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membentuk budaya literasi dan kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan semata-mata hasil besarnya anggaran, melainkan ditentukan oleh koherensi kebijakan, kesinambungan strategi nasional, dan integrasi pendidikan dengan nilai sosial. Pendidikan dasar di Kuba terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendorong kesetaraan akses, retensi sekolah, dan literasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan kemajuan berarti dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan dasar. Reformasi Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi pembelajaran yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Selain itu, program literasi sekolah,

pembangunan sudut baca, serta intervensi sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan operasional (BOS) memberikan dasar bagi peningkatan akses pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan tersebut tidak berlangsung merata antardaerah. Ketimpangan geografis, disparitas sumber daya, kapasitas tata kelola daerah yang beragam, serta keterbatasan distribusi guru masih menjadi hambatan struktural yang memengaruhi mutu pendidikan dasar secara nasional.

Temuan ini menguatkan pandangan para peneliti seperti Lamrani (2022) dan Williams (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan literasi dan pemerataan pendidikan tidak hanya terkait dengan besar kecilnya alokasi anggaran, tetapi erat bergantung pada integrasi program pendidikan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa literasi tidak cukup dibangun melalui program teknis seperti penyediaan buku dan sudut baca; ia memerlukan partisipasi aktif keluarga, komunitas, dan organisasi sosial agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan

berkelanjutan. Temuan ini juga selaras dengan laporan OECD (2023) yang menyoroti bahwa desentralisasi tanpa mekanisme koordinasi dan pengawasan yang kuat berpotensi memperkuat ketimpangan antarwilayah.

Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan pendidikan dasar tidak ditentukan semata oleh besarnya sumber daya, tetapi oleh empat unsur kunci: (1) koherensi kebijakan nasional, (2) strategi pemerataan sumber daya, (3) kapasitas tata kelola lokal, dan (4) integrasi budaya literasi dalam kehidupan masyarakat. Negara yang berhasil membangun fondasi pendidikan dasar yang kuat adalah negara yang mampu menyelaraskan empat elemen tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan.

A. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem pendidikan dasar di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan pemerataan hasil belajar dan memperkokoh budaya literasi.

(1) Memperkuat Program Literasi Berbasis Komunitas

Literasi yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya melalui intervensi sekolah; ia memerlukan dukungan ekosistem sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperluas program literasi berbasis komunitas, yang mencakup:

- pembentukan pusat literasi desa,
- penguatan peran perpustakaan daerah,
- pelibatan tokoh masyarakat dan kelompok pemuda sebagai agen literasi,
- kegiatan membaca bersama dan kelas literasi orang tua,
- integrasi literasi dengan kegiatan sosial lainnya seperti posyandu, PKK, dan karang taruna.

Konsep ini mencerminkan model Kuba di mana literasi menjadi bagian dari aktivitas sosial yang lebih luas. Dengan membangun budaya literasi di tingkat komunitas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi oleh seluruh keluarga, sehingga memperkuat lingkungan belajar di rumah.

(2) Meningkatkan Pengawasan dan Koordinasi pada Era Desentralisasi

Desentralisasi memberikan ruang inovasi, tetapi tanpa koordinasi dan pengawasan yang kuat dapat menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, rekomendasi kedua adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, melalui:

- penetapan standar nasional yang lebih tegas untuk kualitas guru dan sarana belajar,
- pemantauan kualitas layanan pendidikan secara berkala berbasis data,
- peningkatan supervisi kepala sekolah dan pengawas sekolah,
- metode pengukuran kesenjangan pendidikan yang lebih terstruktur,
- program intervensi khusus untuk daerah tertinggal secara terarah dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat mekanisme pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh daerah menjalankan kebijakan pendidikan dengan standar yang seragam tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.

(3) Mengoptimalkan Integrasi Program Sosial dan Pendidikan untuk Pemerataan Hasil Belajar

Pemenuhan kebutuhan dasar anak merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pendidikan dasar. Di banyak daerah terpencil, siswa menghadapi hambatan sosial seperti keterbatasan gizi, minimnya akses layanan kesehatan, serta kondisi keluarga yang tidak mendukung proses belajar. Oleh karena itu, intervensi pendidikan perlu terintegrasi dengan kebijakan sosial melalui:

- program makan bergizi di sekolah,
- layanan kesehatan anak dan pemeriksaan rutin,
- pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi sekolah,
- penguatan transportasi sekolah bagi daerah terpencil,
- dukungan psikososial bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Integrasi ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan memperbesar peluang keberhasilan siswa di berbagai wilayah.

B. Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan diperlukan untuk memperdalam pemahaman mengenai beberapa aspek penting. Pertama, diperlukan kajian rinci tentang efektivitas program literasi berbasis masyarakat di berbagai konteks sosial Indonesia, mengingat variasi karakter budaya, bahasa, dan struktur komunitas yang sangat beragam. Penelitian ini penting untuk menentukan strategi literasi yang paling sesuai bagi daerah perkotaan, pedesaan, dan wilayah terpencil.

Kedua, diperlukan analisis mendalam mengenai strategi pengelolaan guru di daerah terpencil, termasuk pola rekrutmen, insentif, pelatihan, dan retensi. Distribusi guru merupakan salah satu isu paling kritis dalam pemerataan kualitas pendidikan, sehingga strategi berbasis bukti (evidence-based) menjadi kebutuhan mendesak untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan dasar yang lebih komprehensif,

berkeadilan, dan sesuai dengan konteks keanekaragaman Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, R. (2024). The impact of the reading corner program in elementary schools. *Jurnal Literasi*.
- Education Profiles. (2023). Cuba: Climate change communication and education. *Education-Profiles.org*.
- Financial Times. (2025). Indonesia places a 28 billion dollar bet on free school meals.
- Hariyono, E. (2024). Development of education policy in Indonesia. *Conference Paper / Policy Review*.
- Lahiya, A. (2025). Education administration reform: A case study Implementation of Merdeka curriculum in Indonesia. *INJOSEDU*.
- Lamrani, S. (2022). The “Yo, Sí Puedo” literacy programme: A Cuban proposal for adult literacy and international cooperation. *Études Caribéennes / Caribbean Studies*.
- Munawir, M. (2021). *Model pendidikan antar negara*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 results*:
- Indonesia country note*. OECD Publishing.
- Uçar, N. (2022). Cuba education system: Comparative education. *The Online Journal of New Horizons in Education*.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). *Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education*. UNESCO.
- Verdecia, Y. A. (2022). The impact of COVID-19 on the education of Cuban children and adolescents. *Journal of Critical Education Policy Studies*.
- Widiastuti, I. (2025). Assessing the impact of education policies in Indonesia. *Journal Article*.
- Williams, K. M. (2022). Exploring new literacies: A case study of Cuban primary schools. *Journal of Multicultural Education*.
- World Bank. (2020–2022). Government expenditure on education: Cuba and Indonesia. *World Bank Data Portal*.